

Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Tol di Provinsi Riau (Studi Kasus Tol Permai Pekanbaru-Dumai)

Ella Syahputri¹ Febri Yuliani²

Public Administration, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: ella.syahputri4508@student.unri.ac.id¹ febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the toll tariff increase policy in Riau Province with a case study on the Pekanbaru-Dumai Toll Road. The increase in toll tariffs is an important issue because it has a direct impact on community mobility, logistics costs, and regional economic growth. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with toll road managers, road users, as well as policy analysis and secondary data related to toll rates and vehicle traffic. The results of the study indicate that the tariff increase policy is based on regulations that regulate tariff adjustments every two years based on inflation, but its implementation has not fully considered people's purchasing power and its impact on local economic activities. This study recommends the need for a comprehensive evaluation of the tariff adjustment policy by considering the socio-economic aspects of the community and increasing transparency in the decision-making process.

Keywords: Analysis of Toll Tariff Increase Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan kenaikan tarif tol di Provinsi Riau dengan studi kasus di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Kenaikan tarif tol menjadi isu penting karena berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, biaya logistik, dan pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak pengelola jalan tol, pengguna jalan, serta analisa kebijakan dan data sekunder terkait tarif tol dan lalu lintas kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif didasarkan pada regulasi yang mengatur penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali berdasarkan inflasi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mempertimbangkan daya beli masyarakat dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi komprehensif terhadap kebijakan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Tol



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fungsi jalan tol adalah menghubungkan pusat produksi dengan pasar global, oleh karena itu untuk memudahkan aktifitas bisnis jalan tol menjadi alternatif untuk mempercepat arus keluar masuk barang. Tetapi dalam hal ini program pemerintah yang lebih fokus membangun jalan tol di daerah perkotaan perlu diluruskan, yakni seharusnya lebih memperhatikan kondisi jalan-jalan di pedesaan yang sebenarnya sangat membantu masyarakat yang rata-rata miskin dalam meningkatkan aktifitas ekonomi mereka, sehingga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat dihapuskan. Oleh karena itu pemerintah harus segera memperbaiki kondisi jalan antar desa di seluruh Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pro rakyat. PT Hutama Karya (HK) pun telah melakukan penyesuaian tarif Tol Pekanbaru-Dumai yang naik sebesar RP53 ribu untuk kendaraan kecil atau Golongan I. dengan demikian maka, kendaraan golongan I yang melintasi

jalan tol dari Pekanbaru menuju Dumai atau sebaliknya dikenakan tarif sebesar Rp171.500. Sebelumnya hanya Rp118.500. Dan tertuang pada keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 415/KPTS/M/2024 tentang penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol pekanbaru-dumai, yang diteken menteri PUPR basuki hadimuljono, 19 februari 2024. Pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan jalan tol pekanbaru-dumai adalah PT Jasa Marga ia adalah pemain utama dalam pengelolaan jalan tol di Indonesia dan badan pengatur jalan tol (BPJT), lalu perusahaan swasta yang terlibat dalam pembangunan jalan tol pekanbaru-dumai adalah perusahaan sinarmas land.

Per 18 Maret 2024, tarif tol Permai (Pekanbaru-Dumai) mengalami peningkatan yang signifikan dari tarif sebelumnya. Golongan I, II, dan III kini membayar lebih tinggi untuk melintasi jalur ini, dengan kenaikan mencapai ratusan ribu rupiah, sehingga seluruh travel yang menggunakan jalan tol juga menaikkan harga travel tersebut dengan jumlah yang meningkat. Jalan tol Dumai-Pekanbaru adalah salah satu ruas jalan yang baru saja terselesaikan oleh pemerintah. Jalan tol ini berada di Provinsi Riau tepatnya di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten siak dan Kota Pekanbaru. Jalan tol Dumai-Pekanbaru menghubungkan koridor-koridor ekonomi utama di Provinsi Riau antara lain Dumai-Duri-Kandis-Patapahan-Minas-Pekanbaru. Jalan tol Dumai-Pekanbaru merupakan salah satu segmen dari proyek tol Trans Sumatera yang berguna untuk memperlancar jarak tempuh yang lebih dekat. Untuk masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi mereka menggunakan transportasi umum seperti travel atau bus. Untuk berpergian dari satu daerah ke daerah lain dengan menggunakan jalan tol agar lebih cepat dan nyaman. Namun dengan adanya kenaikan tarif tol ini travel juga menaikkan harga angkutannya.

Provinsi Riau memiliki 2 kota besar yaitu kota Dumai dan kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi. Kota Pekanbaru terhubung dengan kota Dumai melalui ruas jalan yang merupakan salah satu ruas jalan yang penting di pulau Sumatera. Hal ini dikarenakan kota Dumai memiliki satu diantara pelabuhan terpenting di pulau Sumatera yang dapat menjadi arus keluar dan masuknya barang atau jasa dari dan menuju provinsi Riau. Berdasarkan data dari *Integrated Road Management System* (IRMS) pada tahun 1999, panjang ruas jalan lintas Pekanbaru menuju Dumai yaitu 199,45 km dengan volume kendaraan rata-rata yang melintas setiap harinya yaitu 3000-4000 smp/hari. Kemudian, waktu tempuh yang dialami oleh pemakai jalan dapat mencapai 4-5 jam serta memiliki resiko kecelakaan rata-rata hingga 60%. Sementara itu, komposisi kendaraan yang memenuhi ruas jalanan ini terdiri dari kendaraan pribadi sebesar 51% kendaraan angkutan umum sebesar 12%, dan kendaraan angkutan barang sebesar 37% (sandhyavitri & saputra, 2013). Tol ini dilengkapi oleh 7 gerbang tol dan 5 pasang tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area. TIP terbagi menjadi 2 tipe yakni tipe A yang terletak di km 14,5, km 45, dan km 82, sedangkan tipe B terletak di km 64 dan km 13 (arah Pekanbaru) (PT. Hutamakarya). Pada pembangunannya, ruas jalan tol Dumai-Pekanbaru memiliki total panjang 131,48 km yang terbagi menjadi 6 seksi, yaitu:

Tabel 1. Data Ruas Jarak Jalan Tol Tahun 2024

Tujuan	Seksi	Jarak
Pekanbaru-Minas	1	9,2 km
Minas-Petapahan	2	23,6 km
Petapahan-Kandis Utara	3	17,45 km
Kandis Utara-Duri Selatan	4	28,95 km
Duri Selatan-Duri Utara	5	27,23 km
Duri Utara-Dumai	6	25,05 km

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol

Kajian Teoritis

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dalam arti luas dimaknai sebagai bentuk penelitian terapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi agar menemukan solusi permasalahan yang tepat. Pada era sekarang dengan bantuan ilmu modern berbasis teknologi dapat dijadikan sebagai alat dalam memecahkan permasalahan. Selain itu dengan bantuan teknologi modern juga mempermudah dalam mengamati langkah-langkah, menyusun informasi, penemuan bukti-bukti dan menemukan dampak penerapan analisis kebijakan yang akan membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan tindakan yang memiliki keuntungan dalam menganalisis kebijakan. Didalam analisis kebijakan terdapat analisa biaya berupa analisa efektifitas biaya, analisis sistem biaya dan manfaatnya, dan analisis opertion riset. Namun disamping itu hal yang sangat diperhitungkan dalam analisis kebijakan adalah menganalisis kesulitan dan kendala lembaga yang berkaitan dengan keputusan publik dan proses penerapannya.

Defenisi Jalan Tol

Menurut PP No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pengertian jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif, namun dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. Dikutip dari laman resmi Daihatsu Indonesia, singkatan dari Tol adalah tax on location. Penamaan ini merujuk pada penerapan tarif saat melalui beberapa pemberhentian di jalan tol. Tarif yang dikenakan saat melalui jalan tol juga berbeda-beda sesuai dengan panjang jalurnya. Jalan tol dikenal sebagai jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat yang menghubungkan antar kota dan provinsi agar lebih cepat dan nyaman. Namun, sekarang tidak sedikit jalan tol dalam kota yang dibuat dengan jarak pendek untuk memperlancar arus lalu lintas.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dengan Penaikan Tarif Tol

Adanya kenaikan tarif jalan tol Pekanbaru-Dumai secara tidak langsung menyebabkan pengeluaran tiap bulan rumah tangga yang terkena jalan tol semakin meningkat, baik pengeluaran untuk pangan maupun untuk non pangan. Adanya peningkatan pengeluaran lebih dikarenakan oleh kondisi ekonomi sekarang dimana semua harga naik, sehingga pengeluaran masyarakat menjadi meningkat. Faktor lain yang menyebabkan semakin tingginya pengeluaran yaitu adanya sifat konsumtif warga yang menerima uang hasil bagi untung. Pembagian uang hasil bagi untung mengakibatkan sebagian warga menghabiskan uang mereka untuk membeli barang-barang yang tidak seharusnya mereka beli, seperti televisi, handphone dan barang elektronik lainnya, mobil, sepeda motor ataupun dibagi kepada semua saudara sebagai bentuk pembagian warisan orang tua. Kondisi ini khususnya terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki rumah selain pada lokasi yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol. Selain itu juga warga yang lahan sawah dan tegalannya tergusur lebih memilih menggunakan uang hasil bagi untung mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya daripada untuk membeli lahan sawah atau tegalan lagi. Dengan kenaikan tarif tol Pekanbaru-Dumai juga berdampak sangat drastis untuk pengeluaran sehari-hari dikarenakan ada beberapa masyarakat yang pulang pergi seminggu sekali dari pekanbaru ke dumai dikarenakan beberapa ada yang bekerja diluar kota tersebut sehingga sangat banyak pengeluaran dalam kehidupan sehari-harinya.

Dampak Pembangunan Jalan Tol

Dampak positifnya adalah dapat mengurangi kemacetan dan dapat membuka lapangan kerja skala besar, masyarakat sekitar gerbang jalan tol, dapat membuka usaha seperti rumah makan, took oleh-oleh, rest area, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya adalah meskipun jalan tol dirancang untuk mengurangi kemacetan, dalam beberapa kasus, pembangunan jalan tol dapat menarik lebih banyak kendaraan, mengakibatkan peningkatan volume kendaraan dapat meningkatkan polusi udara dan suara.

Penentuan Tarif Tol

Penentuan tarif tol di Indonesia didasarkan pada beberapa faktor, termasuk biaya investasi jalan tol, biaya operasional kendaraan, kemampuan membayar pengguna jalan, dan evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol. Tarif tol juga dapat disesuaikan secara berkala, biasanya setiap dua tahun, dengan mempertimbangkan laju inflasi dan evaluasi SPM.

Kenaikan Tarif Tol

Kenaikan tarif tol adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pengelola jalan tol untuk meningkatkan biaya yang dikenakan kepada pengguna jalan dalam menggunakan fasilitas jalan tol. Kebijakan ini biasanya dilakukan dalam rangka menyesuaikan tarif dengan berbagai faktor yang mempengaruhi biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur jalan tol. Kenaikan tarif tol dapat dipengaruhi oleh sejumlah pertimbangan, termasuk inflasi, peningkatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di PT Hutama Karya yang bertempat di gerbang tol Pekanbaru-Dumai kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa informan yaitu Section Head Operasional jalan tol Pekanbaru dumai, Sekretaris PT hutama Karya, pengguna jalan tol Pekanbaru-Dumai. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh dilihat dari segi sumber perolehan data atau darimana data tersebut berasal secara umum dengan penelitian dengan mana yang bisa dikenal dengan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian yakni sumber daya manusia yang ada di PT Hutama Karya kota Pekanbaru. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti melalui metode dokumentasi yang dapat dari bacaan, literatur, dan dokumentasi dari PT Hutama Karya kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data nya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Tol Pekanbaru-Dumai

Analisis kebijakan kenaikan tarif tol adalah kebijakan kenaikan tarif tol yang diatur berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 415/KPTS/M/2024 tentang penyesuaian tarif tol jalan tol pada ruas jalan tol pekanbaru-dumai. Kenaikan ini biasanya dilakukan secara bertahap dan berdasarkan evaluasi inflasi

serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum republik indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan, dan mengukur seberapa baik suatu kegiatan atau proses dalam mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, efektivitas berkaitan dengan pencapaian target dan keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Hasil wawancara dengan SH operasi HKA menjelaskan bahwa: *"sebelum kenaikan tarif ada proses pemeriksaan SPM (standar pelayanan minimal) yang dilakukan oleh kementrian PUPR, dan setelah dari hasil itu keluar berita acara pemeriksaan, berita acara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, dan setelah diverifikasi dan dinyatakan selesai, berita acara akan terbit rekomendasi teknik dari direktur jendral jalan bebas hambatan dan itu baru bisa jadi pertimbangan untuk kenaikan tarif, kalau komunikasi soal kenaikan tarif diterapkan Focus Group Discussion (FGD) dengan regulator jalan tol (kementrian PU, BPJT, JBH) pengamat ekonomi, dinas perhubungan provinsi riau, pemda riau, akademisi dari universitas, ketua organda riau, perwakilan MTI riau."* **(wawancara dengan SH Operasi HKA, 21 April 2025).**

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang dilakukan dalam menghasilkan efektivitas atau hasil dari kebijakan. Efisiensi adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai dari target kebijakan. Dalam pengukuran efisiensi dilakukan penilaian dari sumber daya yang digunakan. Kebijakan yang mencapai tingkat efektivitas dengan biaya terkecil dinamakan dengan efisiensi. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak PT hutama karya selaku section head operasional HKA menyatakan bahwa: *"kalau dari segi efisiensi tidak ada karena kenaikan tarif tol ini bukan untuk efisiensi tetapi untuk mencakup biaya operasional dan maintenance (OM) jalan tol ini."* **(wawancara dengan SH operasi HKA, 21 April 2025)** Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan pemecahan masalah yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian dalam kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Artinya kecukupan menilai seberapa besar peluang dari kebijakan kenaikan tarif tol tersebut dalam memecahkan masalah terkait beberapa masyarakat yang mengeluh karena kenaikan tarif tol tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak PT hutama karya selaku menyatakan bahwa: *"untuk menghitung kecukupan tarif tol tersebut sesuai dengan PP 15 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 yang berisi:*

- (1) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula: Tarif baru = tarif lama (1 + inflasi).*
- (2) BPJT merekomendasikan hasil evaluasi penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat kepada menteri.*
- (3) Menteri menetapkan pemberlakuan penyesuaian tarif tol"* **(wawancara dengan SH Operasi HKA, 21 April 2025).**

Perataan berkenaan dengan manfaat dari suatu kebijakan. Perataan dapat diukur dengan melihat apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam hal perataan apakah sasaran dari kebijakan kenaikan tarif tol tersebut sudah tepat kepada kelompok-kelompok atau masyarakat kalangan rendah. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak PT hutama karya selaku section head operasi HKA menyatakan bahwa: *"Pemerataan ekonomi antar daerah adalah menjadi salah satu faktor dibangunnya jalan tol, yang dulunya tidak menggunakan tol dari pekanbaru ke dumai memakan waktu 7 hingga 8 jam, dan setelah adanya jalan tol hanya*

memakan waktu 3 jam saja, dan juga mempercepat pengiriman logistic antar daerah juga menjadi pemerataan ekonomi.” (wawancara dengan SH operasi PT Utama Karya, 21 April 2025) Responsivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga untuk tanggap dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat. Ini berarti mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, dan mengembangkan program atau layanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak PT utama karya selaku menyatakan bahwa: *“kenaikan tarif tol PT Utama Karya bisa mengatasi inflasi dan biaya operasional untuk menjaga kualitas layanan jalan tol dengan dari adanya pendapatan dari kendaraan yang menggunakan jalan tol dan digunakan untuk pengembangan infrastruktur jalan tol.” (wawancara dengan SH Operasi HKA, 21 April 2025).*

Ketepatan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara tepat atau sesuai dengan target yang diinginkan, atau juga bisa meujuk pada derajat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya atau hasil pengukuran sebelumnya. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak PT utama karya selaku menyatakan bahwa: *“dari segi penyeimbangan antara pendapatan dan kemampuan bayar pengguna jalan tol itu juga dinilai dari tingkat inflasi” (wawancara dengan SH Operasi HKA, 21 April 2025).*

Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Kebijakan Kenaikan Tarif Tol Pekanbaru-Dumai

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat diperhatikan dalam menyusun kebijakan tarif tol Pekanbaru-Dumai meliputi :

1. Infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur jalan tol yang berlubang mengacu pada kondisi jalan tol yang memiliki lubang atau kerusakan pada permukaan jalan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrem, tingginya volume kendaraan, dan masalah pada konstruksi atau pemeliharaan. Penyebabnya adalah hujan deras, usia jalan, beban kendaraan berat, dan masalah konstruksi atau pemeliharaan bisa menyebabkan jalan tol berlubang. Dampak yang ditimbulkan dari jalan tol yang rusak adalah ban pecah, dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
2. Inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi terjadi ketika daya beli uang menurun karena harga-harga kebutuhan pokok naik, inflasi menyebabkan nilai uang menurun, sehingga konsumen sehingga konsumen membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang berasal dari berbagai faktor, baik domestik maupun global. Kenaikan harga energi, pangan, dan gangguan rantai pasok global telah mendorong biaya hidup masyarakat meningkat. Di tengah tantangan ini, pemerintah dan badan usaha jalan tol (BUJT) menghadapi dilema kebijakan, termasuk dalam penyesuaian tarif tol.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan tarif tol pekanbaru dumai belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria kebijakan yang disampaikan oleh Dunn, diantaranya dari segi efektivitas menunjukkan bahwa kenaikan tarif dapat digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan, sehingga memberikan manfaat langsung kepada pengguna. Selanjutnya dari segi efisiensi tidak ada karena kenaikan tarif tol ini bukan untuk

efisiensi tetapi untuk mencakup biaya operasional dan maintenance (OM) jalan tol ini. Selanjutnya kecukupan dari kenaikan tarif tol ini menunjukkan bahwa tarif yang ditetapkan harus cukup untuk menjamin keberlanjutan operasional dan kualitas layanan, tanpa membebani pengguna secara berlebihan. Selanjutnya pemerataan belum sepenuhnya merata untuk kalangan berpenghasilan rendah. Selanjutnya dari responsivitas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil dapat mencerminkan harapan dan kebutuhan pengguna jalan. Selanjutnya dari segi ketepatan sudah tepat karena kenaikan tarif tol ini berdasarkan inflasi dan juga ada peningkatan pada layanan dan infrastruktur jalan tol. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan pemerintah untuk perlu fokus pada perbaikan dan pemeliharaan jalan tol yang ada dengan kenaikan tarif tol ini. Investasi dalam perbaikan jalan yang rusak dan peningkatan kualitas permukaan jalan dapat mengurangi biaya perawatan kendaraan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Jalan yang mulus dan tidak ada kerusakan ini akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi supir truk dan pengguna jalan lainnya. Dan juga adanya melibatkan masyarakat dengan mendengarkan masukan dari mereka yang terdampak langsung, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Puji., And Ayu, Marfiah., 2023. *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Permai Di Kelurahan Muara Fajar Timur, Kota Pekanbaru.*
- Dana A. Kartakusuma, *Kajian Dampak Kumulatif, Kementerian Lingkungan Hidup*, 2004.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Guspi. 2018. *Penentuan Tarif Tol Berdasarkan Analisis Kelayakan Finansial (Studi Kasus: Jalan Tol Pekanbaru-Minas)*
- Habibah, Witri. 2024. *Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Penegakan Pegawai Pada Lantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singing.*
- Juneidi, Bagus. 2023. *Dampak Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.*
- Lovita, Novia. 2021. *Evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama di kabupaten pelalawan.*
- Maria, Novia. 2021. *Dampak Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Di Kota Pekanbaru.*
- Mitrandi, Matius. 2022. *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Minas.*
- Nasution A.F, 2023. *Metode Penrlitian Kualitatif*. Bandung : CV. Harfa Creative
- Nur, Anti. 2022. *Pengaruh Kenaikan Tarif Tol Terhadap Kepuasan Pengguna Jalan Tol (Studi Kasus Pada Tol Bogor Outer Ring Road).*
- Ongkos Ekososial Tol Trans Jawa, koran Tempo 19 Desember 2008.
- Prabawati, Indah. 2019. *Analisis Kebijakan Public*
- Razif, Mohammad. 2019. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Jalan Tol Sebagai Bagian Dari Manajemen Aset Infrastruktur Dan Fasilitas.*
- Santika, Yola. 2022. *Kajian Pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekanbaru Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Dumai.*
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka belajar
- Sumaryoto, 2010. *Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, Dan Ekonomi Lingkungannya.*

- Syarif, Muhammad. 2023. *Jalan Tol (Perencanaan Dan Pengoperasian)*.
- Tampubolon, H. R. W. (2019). *Analisis Break Even Point (Bep) Sebagai Dasar Perencanaan Laba Pada Pt . Asam Jawa Medan*.
- Yakin, A. 1997. *Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan, Teori Dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Akademika presindo. Jakarta.